

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama / NIP : Drs. Waridin, M.S., Ph.D. /131696212
2. Tempat / Tgl. Lahir : Pemalang, 12 February 1962
3. Agama : Islam
4. Pangkat / Golongan : Penata / IIIC
5. Unit Tugas : Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan,
Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
6. Alamat Kantor : Jalan Erlangga Tengah 17, Semarang 50241
Telp. 024-449212, 442273; fax. 024-449212
7. Alamat Rumah : Jalan Peres 166, Semarang 50172
Telp. 024-549604
E-mail: waridin@rocketmail.com
8. Bidang Keahlian : Pembangunan Sumberdaya Masyarakat
Pembangunan Pertanian dan Pedesaan
9. Riwayat Pendidikan :
 - Juli 1986: S1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan,
Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro , Semarang.
 - April 1992: S2 Ilmu Ekonomi Pertanian, Program Pascasarjana
Universitas Padjajaran, Bandung.
 - January 1999: Ph.D. in Community Resource Development, Universiti
Putra Malaysia, Serdang, Selangor.
10. riwayat pekerjaan :
 - 1987-sekarang menjadi dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas
Diponegoro, Semarang.
11. Kegiatan Ilmiah :
 - Annual Forum for Community Development, Centre for Extension and
Continuing Education, Universiti Putra Malaysia: Serdang, Malaysia, 27
oktober 1997
 - The 5th Asian Fisheries Forum: Chiang Mai, Thailand, 11-14 Nopember
1998.
 - FAO Symposium on Population, Food Security, Environment and
Fisheries: Kualalumpur, Malaysia, 14-18 Desember 1998.

EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION OF DECENTRALISATION POLICY IN AGRICULTURAL EXTENSION: A COMPARATIVE PERCEPTION OF EXTENSION OFFICERS IN JAVA, INDONESIA

ABSTRAK

Tujuan utama kajian ini adalah untuk menentukan factor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan desentralisasi dalam bidang penyuluhan pertanian di tiga propinsi di Jawa, Indonesia. Metode pengambilan sample dengan acak tahapan-berganda digunakan untuk menentukan 107 kelompok penyuluh pertanian dan 107 penyelia penyuluh pertanian di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Data dari kepala BIPP dan kontak di tiga daerah tersebut juga digunakan dalam kajian ini.

Efektivitas pelaksanaan kebijakan desentralisasi penyuluhan pertanian berhubungan positif dan signifikan dengan beberapa variable bebas dalam kajian ini. Koordinasi antar institusi yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan, dukungan birokrasi pemerintah daerah, ketersediaan dan kecukupan sumber keuangan dan penyuluh pertanian yang terlatih, serta bimbingan dari institusi terkait merupakan beberapa variable yang berkaitan erat dan memberikan sumbangan yang signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan desentralisasi penyuluhan pertanian. Dengan menggunakan kerangka konseptual yang telah dimodifikasi dari model administrasi public dan keuangan, kajian ini menunjukkan beberapa variable yang berkaitan erat dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan desentralisasi dimaksud. Secara keseluruhan, 55.0% dari varians efektivitas pelaksanaan kebijakan desentralisasi penyuluhan pertanian dapat dijelaskan oleh beberapa variable bebas tersebut di atas.

Kajian ini menemukan bahwa kerangka konseptual yang dimodifikasi dari model pendekatan administrasi public dan keuangan dapat memberikan arah yang cukup baik dalam memprediksi efektivitas pelaksanaan kebijakan desentralisasi dalam bidang penyuluhan pertanian di Indonesia